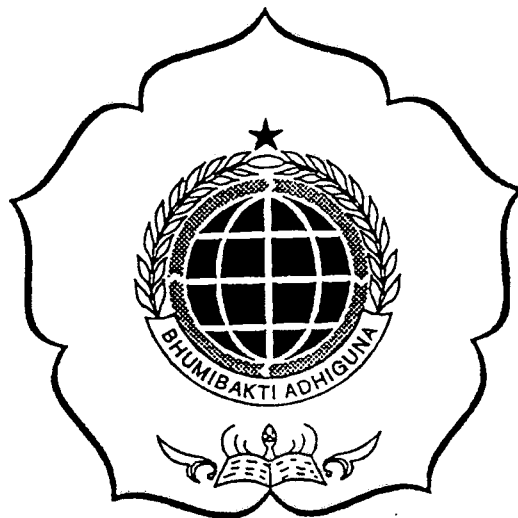


**PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK,  
NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP  
JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN  
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



**Disusun oleh :**

**HERI PURWANTO**

**NIM : 9651015**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xii
DATFAR LAMPIRAN .....	xiii
INTISARI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN...</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	9
B. Kerangka Pemikiran .....	22
C. Hipotesis .....	25
D. Batasan Operasional .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Daerah Penelitian .....	27
C. Variabel Penelitian dan Pengumpulan Data .....	28

	D. Populasi dan Objek Penelitian.....	30
	E. Teknik Analisis .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
	A. Letak Georafis dan Administrasi Wilayah .....	34
	B. Kondisi Fisik Wilayah .....	35
	C. Kependudukan .....	36
	D. Penggunaan Tanah .....	38
	E. Status Tanah .....	40
	F. Pertumbuhan Ekonomi .....	41
	G. Industri .....	43
	H. Perdagangan .....	44
<b>BAB V</b>	<b>PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>45</b>
	A. Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan .....	45
	B. Perbankan .....	50
	C. Flukutuasi Suku Bunga .....	53
	D. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah .....	57
	E. Laju Inflasi .....	60
<b>BAB VI</b>	<b>ANALISA DATA .....</b>	<b>63</b>
	A. Analisa Perbandingan Tingkat Suku Bunga .....	63
	1. Perbandingan antara Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Pemerintah Dengan Bank Pemerintah Daerah .....	64
	2. Perbandingan antara Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Pemerintah Dengan Bank Swasta Nasional .....	64
	3. Perbandingan antara Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Pemerintah Daerah dengan Bank Swasta Nasional .....	65
	B. Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan .....	67

3. Uji Peran Parsial .....	70
C. Pembahasan .....	72
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## INTISARI

Untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan menjaminkan suatu hak atas tanah, maka Pemerintah mengeluarkan *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*. Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan tersebut mulai dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palembang sejak 9 April 1996 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kantor Pertanahan Kota Palembang selama tahun 1997, 1998 dan 1999 menerbitkan sertipikat hak tanggungan sebanyak 2268, 691, dan 480 buah sertipikat hak tanggungan. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan, pada tahun 1998 sebesar 69,53 % dan tahun 1999 sebesar 78,84 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan perekonomian regional di kota Palembang.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang maka penelitian ini mengambil data jumlah sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palembang, fluktuasi suku bunga kredit bank dari Bank Indonesia berdasarkan suku bunga rata-rata tertimbang, fluktuasi nilai tukar rupiah dan laju inflasi selama kurun waktu tahun 1997 s/d 1999.

Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya sumbangan antara jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya digunakan Teknik Analisis Regresi Berganda, sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh / signifikan tersebut dilaksanakan Uji Keseluruhan (*Signif F*) dan Uji Peran Parsial (*T-Test*). Masing-masing teknik analisis dilakukan dengan komputer program SPSS (*Statistic Package for Social Science*) for Window Metode Enter.

Dari analisis tersebut diperoleh dari faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan yaitu meliputi fluktuasi suku bunga kredit bank dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain faktor-faktor yang berperan nyata tersebut terdapat 1 faktor yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan yaitu laju inflasi.

Dari kedua variabel tersebut menunjukkan peran negatif. Dengan demikian hipotesis kerja (*H<sub>k</sub>*) yang diterima adalah :

1. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang berlaku maka semakin berkurang sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan ;
2. Semakin lemah nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika maka semakin berkurang sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan.

Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan yaitu laju inflasi, dengan demikian hipotesis kerja (*H<sub>k</sub>*) ditolak. Sumbangan faktor-faktor diatas secara keseluruhan terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan (*R<sup>2</sup>*) adalah 74,9% sedangkan 26,1%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam dan merupakan komponen lingkungan hidup dalam kedudukannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dimuka bumi ini, karena di atas tanahlah manusia dan makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan berbagai kegiatan usaha dan pembangunan.

Dalam hal ini Sandy dalam Kainda (1999 : 1) berpendapat :

Tanah sebagai komponen lingkungan hidup merupakan wahana bagi kelangsungan hidup manusia baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha, untuk mendukung berbagai bahan tambang yang kesemuanya diperlukan oleh manusia dalam kelangsungan hidupnya.

Kedudukan tanah dalam kehidupan manusia demikian pentingnya sehingga UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional yang sangat pesat dewasa ini khususnya pembangunan di bidang ekonomi, yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan dalam pelaksanaannya diperlukan tersedianya dana yang memadai, dimana salah satu cara penyediaan dana tersebut adalah melalui perkreditan.

Kegiatan di bidang perkreditan yang diperkirakan akan semakin meningkat, dalam proses realisasinya tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi beberapa pihak yaitu kreditor, debitor serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan sistem tersebut, sehingga kepentingan berbagai pihak tersebut perlu diperhatikan dan yang sangat penting adalah terciptanya kepastian dan perlindungan hukum.

Guna memberikan jaminan keamanan dalam kegiatan perkreditan terutama kepada kreditor, debitor dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan sistem tersebut, khususnya yang menggunakan jaminan sesuatu hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dan keseimbangan dalam perlindungan hukum dimaksud, maka pada tanggal 9 April 1996 telah ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang dinyatakan dalam Pasal 57, bahwa : Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut pada pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

Iswardono (1997 : 157) berpendapat bahwa:

Sebagai satu kesatuan dari kebijaksanaan ekonomi makro, kebijaksanaan moneter di Indonesia mempunyai peranan penting di dalam pembangunan nasional. Kebijakan moneter bersama-sama dengan kebijaksanaan makro lainnya seperti kebijaksanaan fiskal dan neraca pembayaran, diarahkan mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

Lebih lanjut dikatakan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, tidak hanya mengatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, tetapi juga mempengaruhi alokasinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong kegiatan produksi dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang mempunyai dampak ganda besar, banyak menggunakan tenaga kerja, dan mendorong usaha-usaha golongan ekonomi lemah.

Di dalam proses pencapaian sasaran kebijaksanaan moneter sering berhadapan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan. Indikator perkembangan moneter dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah suku bunga. Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi.

Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, kebijaksanaan moneter diarahkan untuk mendorong perbankan meningkatkan pengerahan dana masyarakat. Untuk itu maka suku bunga diupayakan agar tetap dapat mendorong kegiatan investasi dan produksi, tidak mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung, dan tidak mengakibatkan pengaliran modal ke luar negeri. Peningkatan pengerahan dana tersebut memungkinkan perbankan meningkatkan pemberian kredit guna mendorong kegiatan ekonomi yang berorientasi pada ekspor, kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, mendorong perkembangan koperasi, membantu



Sebagai contoh dari data Bank Indonesia pada bulan Februari 1992 pangsa kredit pada sektor property sebesar 11 % dari seluruh kredit perbankan dan itu meningkat menjadi sebesar 17,2 % pada bulan Februari 1996. Sedangkan di sektor perdagangan 21,2 %, perindustrian 29,3 %, dan sektor-sektor lainnya sebesar 32 %. Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit di sektor property ini yaitu pada bulan September 1995 sebesar 41 trilyun rupiah atau 17 %, ternyata jumlah kredit yang macet sebesar 3,7 trilyun rupiah (Kompas dalam Buletin Sandi : 1996).

Seiring dengan perkembangan situasi negara Republik Indonesia akhir-akhir ini, bahwa perekonomian Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini telah diterpa badai krisis moneter. Titik lemah perekonomian Indonesia terletak pada keterlambatan dalam pembenahan tiga mata rantai penting di dalam lingkaran permasalahan (*vicious circle*) yang membelenggu perekonomian Indonesia selama krisis (Info Bank, Januari 1999).

Ketiga mata rantai tersebut adalah kondisi moneter yang tidak stabil, kondisi perbankan yang lemah dan dunia usaha yang dibebani masalah utang. Pembenahan mata rantai tersebut diantaranya melalui kestabilan nilai rupiah, menjadi fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia yaitu dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang diukur dengan kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa lingkaran permasalahan yang

permasalahan sosial yang meningkat dengan diikuti kondisi kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini akan berdampak pada nilai tukar rupiah melemah yang berdampak pada tingkat inflasi meningkat tajam dan juga suku bunga ikut meningkat, akibatnya maka dunia usaha akan mengalami kemunduran karena tidak dapat melakukan perjanjian kredit dengan keadaan tersebut.

Dengan keadaan yang demikian hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan moneter yang akan diambil oleh pemerintah. Sebagai contoh pada tahun 1997 pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan uang ketat untuk memperkuat nilai rupiah yang terus merosot. Selain itu juga pada akhir tahun 1998 pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan bunga tinggi yang diterapkan Bank Indonesia, (Info Bank, Januari 1999). Semua kebijakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menstabilkan gejolak perekonomian Indonesia.

Dengan keadaan demikian dapat ditarik suatu hubungan antara kegiatan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan yang selalu membutuhkan penyediaan dana melalui jasa perkreditan dengan jaminan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disisi lain bahwa pemberian kredit oleh kreditor (pihak perbankan) kepada debitor (pengguna dana) akan selalu mengikuti indikator-indikator perekonomian yang terjadi diantaranya tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan laju inflasi yang berlaku saat itu.

Penulis menyadari bahwa telah banyak penelitian mengenai hak tanggungan dari berbagai sudut pandang untuk berbagai kepentingan, namun demikian penulis

bunga kredit bank, nilai tukar rupiah dan laju inflasi terhadap jumlah penerbitan sertifikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Ibu Kota provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, telah dilaksanakan kegiatan pembangunan diberbagai sektor antara lain sektor property, perdagangan, perindustrian dan jasa yang telah dibantu penyediaan dananya melalui jasa kredit bank pemerintah dan swasta. Dengan meningkatnya pelayanan jasa kredit perbankan ini akan berpengaruh terhadap jumlah penerbitan sertifikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan tujuan untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Oleh karena hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas bahwa kegiatan pembangunan perekonomian akan terus dilaksanakan dengan membutuhkan penyediaan dana yang diantaranya dari jasa kredit perbankan dengan memperhatikan indikator-

inflasi yang berlaku saat itu. Sementara itu untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan maka kegiatan perkreditan yang menggunakan agunan hak atas tanah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996) yaitu dengan diterbitkannya sertipikat hak tanggungan.

Dengan berlatar belakang adanya keterkaitan antara tingkat suku bunga yang dipengaruhi besarnya nilai tukar rupiah dan besarnya laju inflasi, dikatakan bahwa suku bunga meningkat semata-mata untuk menekan atau mempengaruhi nilai tukar rupiah yang terus meningkat dan mengurangi jumlah uang yang beredar (inflasi). Sehingga dapat ditarik hubungan antara besarnya nilai tukar rupiah dan laju inflasi serta suku bunga kredit terhadap besarnya perjanjian kredit yang menggunakan jaminan hak atas tanah dengan dibebani hak tanggungan.

Oleh karena itu agar bisa dipahami suatu keterkaitan atau hubungan yang terjadi antara fluktuasi tingkat suku bunga kredit bank, fluktuasi nilai tukar rupiah dan tingkat laju inflasi dengan jumlah sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan saat itu, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh fluktuasi suku bunga kredit bank, nilai tukar rupiah dan laju inflasi terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui pengaruh fluktuasi tingkat suku bunga kredit bank, nilai tukar rupiah, dan laju inflasi terhadap jumlah penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahan informasi bagi Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan.
- b. Menambah khasanah pustaka di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan sertipikat Hak Tanggungan.
- c. Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Palembang telah banyak dibantu pembiayaannya melalui jasa kredit perbankan. Untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan menjaminkan hak atas tanah wajib dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 4 Tahun 1996).
2. Kantor Pertanahan Kota Palembang selama kurun waktu tahun 1997, 1998 dan 1999 menerbitkan sertipikat hak tanggungan sebanyak 2268, 691, dan 480 buah sertipikat hak tanggungan. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan, pada tahun 1998 sebesar 69,53 % dan tahun 1999 sebesar 78,84 %.
3. Penurunan jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan antara lain fluktuasi suku bunga kredit bank, nilai tukar rupiah dan laju inflasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat

4. Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan teknik analisis regresi berganda yang pengolahannya dilakukan dengan komputer program SPSS antara lain menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan meliputi :

1. Fluktuasi Suku Bunga Kredit Bank (X1)
2. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah (X2)

Selain faktor-faktor yang berperan nyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan, terdapat satu faktor yang tidak berpengaruh secara nyata, yaitu Laju Inflasi (X3)

5. Secara keseluruhan sumbangan kedua faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan sebesar 64 % sedangkan sisanya 36 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

## 2. S a r a n

1. Dua faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan dalam penelitian yaitu ternyata memberikan sumbangan sebesar 74 % terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang, sedangkan 26 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Oleh Karena itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

2. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang agar didalam membuat suatu rencana kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak tanggungan yang berkaitan dengan target kegiatan agar dapat disesuaikan dengan perkembangan suku bunga kredit dan nilai tukar rupiah yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Penerbit Jambatan.
- Sandy, I Made (1996), *Tanah-Muka Bumi-UJUPA*, PT.Indograph Bakti-FMIPA-UI Jakarta, Jakarta.
- Walijatuj, Djoko (1999), *Tanah Sebagai Jaminan Kredit dan Kaitanbnya dengan Undang-undang Hak Tanggungan*, Yogyakarta.
- Tiong, Oey Hoey (1985), *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedewi Masjchoen Sofyan, Sri, (1980) *Hukum Perdata Hukum Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadi Soeprapto, Hartono (1984), *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R, (1985), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Prtadnya Paramita, Jakarta.
- Kainda (1999), *Studi Harga Tanah di Kecamatan Pontianak Selatan Kotamadia Pontianak Propinsi Kalimantan Barat*, Skrip DIV Pertanahan, STPN Yogyakarta.
- Buletin Sandi, Edisi No.5/XI/1996, *Unifikasi Lembaga Hak Jaminan atas tanah*.
- Harsono, (1996), *Undang-undang Hak Tanggungan Menuntaskan Unifikasi Hukum Tanah Nasional*, Buletin Sandi, Yogyakarta.
- Properti Indonesia, Edisi September 1997, *Gejolak Berantai Uang Ketat*.
- Info Bank, Edisi Januari 1999, *Optimisme Baru Bisnis Uang 1999*.
- Boediono, (1980), *Ekonomi Moneter*, Badan Penelitian Fakultas Ekonomi (BPFE) Yogyakarta, Yogyakarta.
- Iswardono SP (1989), *Ekonomi Mikro*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Iswardono SP (1997), *Uang dan Bank*, Badan Penelitian Fakultas Ekonomi (BPFE)

Djumhana (1996), Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung.

Singaribun, Masri (1989) Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

Anonim, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Anonim, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Anonim., Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Uu Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.